

Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar (Jentak) Tahun 1950-1960

Nurul Annisa, Muh. Rasyid Ridha, Jumadi

Mahasiswa Angkatan 2014, Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM
annisameireski@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang aksi perampokan pada masa DI/TII di Jeneponto/Takalar (Jentak) tahun 1950-1960. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jeneponto/Takalar Memasuki periode tahun 1950-1960 DI/TII berhasil menguasai Kewedanan Jeneponto/Takalar. Masyarakat masih menjunjung tinggi Budaya *Siri' na Pacce* (malu dan pedih) serta stratifikasi sosial. Adapun stratifikasi sosial yang ada di Jeneponto-Takalar (Jentak) yakni: *Karaeng* (Bangsawan), *Daeng / To Maradeka* (orang merdeka), *Ata* (Budak). Selain itu masyarakat Jeneponto/Takalar (Jentak) bertahan hidup dengan mengusahakan pertanian dan persawahan. Hanya saja kondisi keamanan daerah dan pemerintahan yang tidak stabil sebagai akibat dari gerakan DI/TII. Keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku perampokan untuk melakukan aksi perampokan yang menjadikan sebagai sumber penghasilan. Hal ini berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi dan pemerintahan Jeneponto/Takalar. Masyarakat dalam hal ini paling banyak dirugikan, masyarakat kehilangan harta dan benda berharganya bahkan kehilangan nyawa. Selain itu masyarakat mengalami dampak psikis yakni trauma karna aksi perampokan yang disertai kekerasan. Pemerintah pun turut merasakan dampak aksi perampokan tersebut karena kerap kali barang milik negara juga dirampok, pegawai pemerintahan pun merasa ketakutan. Akibatnya kondisi pemerintahan tidak terkontrol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan terdiri dari wawancara (*Gallarrang*, anggota O.P.R., keluarga anggota DI/TII dan tokoh agama) dan mengumpulkan sumber arsip (arsip Jeneponto dan arsip Sulawesi) serta literatur-literatur yang berhubungan.

Kata Kunci : *Aksi Perampokan, Masa DI/TII, Kewedanan Jeneponto/Takalar*

Abstract

This paper discusses about robbery the time of DI/TII in Jeneponto/Takalar (Jentak) of 1950-1960. The result of study indicated that the people of Jeneponto/Takalar entered the 1950-1960 period, DI/TII succeeded to control of *Kewedanan* Jeneponto/Takalar. Society still up holds the culture *siri' na pacce* (shame and grief) and social stratification. As for the social stratification that son Jeneponto/Takalar (Jentak) which is: *Karaeng* (noble), *daeng/tomaradeka* (freeman), *ata* (slave). Further more, the people of Jeneponto/Takalar (Jentak) survive by straining for agriculture and rice-field. It's just that the state of region security and government are unstable as a result of the movement DI/TII. This situation has been exploited by some perpetrators to pull off robberies that make it their source of income. This affect the social conditions, economic and government of Jeneponto/Takalar. People in this regard have been seriously injured, people losing their property and possessions and even losing their lives. In addition, people suffer the

psychic effects of trauma of violent robbery. The government also felt the effects of the robbery because of the frequent theft of state property, government were also terrified. This results in uncontrolled governmental conditions. This study that use a historical research method, which is: heuristic, source criticism, interpretation and historiography. Data collection methods are conducted in field research consisting of interviews (*Gallarrang*, O.P.R. members. Member family of DI/TII and religious figures) and collect resources (Jeneponto and Sulawesi archives) and literature related.

Keyword: Robbery, The time of DI/TII, Kewedanan Jeneponto/Takalar

A. Pendahuluan

Sebagai bangsa yang baru merdeka maka pemerintah terus berupaya membangun bangsa Indonesia dengan menguatkan integrasi maupun pada disintegrasi nasional. (Hamid, 2008) Bangsa Indonesia diperhadapkan dengan permasalahan yakni munculnya gerakan-gerakan yang berusaha untuk menentang pemerintahan dan ingin mendirikan pemerintahan baru. Sebelum Bangsa Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta, ternyata Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan Negara Islam pada tanggal 14 Agustus 1945 di Jawa Barat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Namun, setelah Soekarno – Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo kembali memihak kepada Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949 Negara Islam Indonesia kembali diproklamirkan.

Meski awalnya gerakan ini sebagai wujud protes terhadap Belanda, namun kemudian berbalik menentang pemerintahan Indonesia. (Hamid, 2008) Sejak saat diproklamirkan tersebut, gerakan ini dianggap sebagai gerakan separatis oleh pemerintah. (Piliang, 2010) Dalam perkembangannya, gerakan separatis tersebut meluas, termasuk daerah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan Qahar

Muzakkar memimpin suatu gerakan gerilya yang lebih dikenal dengan nama DI/TII.

Berdirinya DI/TII di Sulawesi Selatan dipelopori oleh Qahar Muzakkar. Berawal dari upaya reorganisasi dan rasionalisasi ketentaraan Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan para gerilyawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pihak pemerintah memberi syarat bahwa setiap calon anggota TNI untuk diseleksi berdasarkan standar kesehatan, pendidikan, serta kemampuan membaca dan menulis sedangkan pihak gerilyawan yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menuntut dibentuk sebuah resimen (Hasanuddin) yang personilnya diambil dari seluruh gerilyawan tanpa melalui seleksi. Puncak pertentangan ini terjadi pada tanggal 1 Juli 1950 di sebuah rapat yang dihadiri oleh A. E Kawilarang selaku Panglima TT. VII/Wirabuana dan Qahar Mudzakkar. (Wanua Tangke, 2005) Qahar Mudzakkar menyampaikan maksud tersebut dalam rapat berdasarkan hak historis mereka, seperti pernyataan berikut:

“Mereka mempunyai hak sejarah bahwa mereka telah berjuang membela bangsa dan taruhan jiwa mereka. Tata cara militer itu hanya melihat orang selama masih dibutuhkan tapi begitu dianggap sudah tidak diperlukan diabaikan begitu saja. Ini tidak adil tata cara militer itu selayaknya tidak diperlakukan kepada mereka. Hak sejarah mereka sebaiknya dipenuhi dan baru kemudian secara perlahan-lahan ditetapkan kepada

mereka saya tahu dan paham dari anggota KGSS, tidak semuanya ingin menjadi tentara, diantara mereka hanya menginginkan pengakuan dari pemerintah, sesudah itu mereka akan kembali ke rumah mereka”. (Wanua Tangke, 2005)

Usulan yang diajukan oleh Qahar Mudzakkar agar anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) diintegrasikan ke dalam TNI dengan nama Brigade atau Resimen Hasanuddin dengan tegas ditolak oleh Panglima TT/ VII/Wirabuana A. E Kawilarang, dengan alasan seorang TNI harus diseleksi berdasarkan standar kesehatan, pendidikan, serta kemampuan membaca dan menulis. Akibat dari penolakan tersebut, Qahar Mudzakkar akhirnya memutuskan untuk keluar dari TNI dan menyatakan memberontak kepada negara. (Barbara Sillars. 1989) Akhirnya Qahar Mudzakkar bersama pasukannya pertama kali menyingkir ke hutan Baraka, Enrekang pada 5 Juli 1950. Melihat hal ini, pemerintah berusaha memenuhi keinginan Qahar Mudzakkar dan pasukannya dengan hanya membentuk Corps Tjadangan Nasional (CTN) pada akhir tahun 1950. Namun hasil dari pembentukan Corps Tjadangan Nasional (CTN) tidak bisa menghentikan langkah KGSS untuk melakukan pemberontakan karena terlanjur kecewa dengan pemerintah. (Gonggong, 1992)

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan resmi diproklamirkan pertama kali oleh Qahar Muzakkar pada 7 Agustus 1953 di Pasui (Baraka) Kabupaten Enrekang. Qahar Muzakkar menyatakan bahwa gerakannya sebagai bagian dari DI/TII pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Qahar Mudzakkar menyatakan daerah Sulawesi dan daerah sekitarnya (meliputi Indonesia bagian Timur termasuk Irian, menjadi bagian dari NII. Qahar Mudzakkar kemudian menjabat sebagai Panglima

Teritorium IV Tentara Islam Indonesia (Panglima TT. IV. T.I.I.). (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99) Jeneponto/Takalar menjadi salah satu daerah yang berhasil dikuasai oleh pasukan DI/TII pada tahun 1952. Sejak saat itulah Jeneponto/Takalar menjadi bagian dari daerah DI/TII atau yang lebih dikenal dengan sebutan gerombolan oleh masyarakat lokal.

Penelitian mengenai Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar Tahun 1950-1960 menurut penelusuran sumber awal peneliti belum mendapatkan penelitian yang lebih komprehensif. Seiring dengan penelitian ini diharapkan mampu lebih komprehensif. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan mengenai “Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar Tahun 1950-1960” diantaranya: Skripsi Gerombolan DI/TII Di Jeneponto Tahun 1950-1960 yang tulis oleh Musdalifah Syam. Tulisan ini membahas mengenai penyebab munculnya gerombolan di Jeneponto, dampak yang ditimbulkan oleh gerombolan, bentuk usaha yang dilakukan masyarakat Jeneponto dalam menghadapi gerombolan. Dijelaskan bahwa gerombolan DI/TII telah membawa penderitaan bagi rakyat Jeneponto karena mengalami tekanan dari pihak gerombolan DI/TII. Perbedaan mendasar karya ini dengan Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar 1950-1960, yakni fokus penelitian yang lebih menekankan pada aksi perampokan yang marak terjadi pada masa DI/TII di Jeneponto/Takalar tahun 1950-1960.

Selain itu terdapat buku karya M. Nafsar Palallo dengan judul *Bandit Sosial Di Makassar Jejak Perlawanan I Tolok Dg. Magassing* diterbitkan oleh Rayhan Intermedia (2008) yang menjelaskan tentang jejak perlawanan I Tolok Dg. Magassing melawan penjajahan Belanda dengan

gerakan perabanditan. Sasaran dari perbanditan/perampokan yang dilancarkan oleh I Tolok Dg. Magassing yaitu kaum bangsawan, dan orang-orang kaya. Hingga gerakan perbanditannya berhasil diredam setelah kematiannya pada tahun 1947. Perbedaan mendasar karya ini dengan Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar 1950-1960, yakni lokasi penelitian di Jeneponto/Takalar dan batasan temporal penelitian fokus pada masa DI/TII.

Pada masa DI/TII kondisi daerah Jeneponto/Takalar tidak aman, karena adanya aksi pergolakan antara DI/TII dan TNI. Langkah perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh pasukan DI/TII melahirkan krisis baru yang semakin membuat rumit permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Hal tersebut memicu munculnya berbagai permasalahan yang ada di Kewedanan Jeneponto/Takalar (Jentak). Salah satu masalah yang muncul yakni aksi perampokan yang sering kali terjadi pada masa DI/TII. Akibatnya melahirkan kesulitan besar bagi sebagian rakyat karena harus kehilangan harta benda yang mereka miliki. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai aksi perampokan yang terjadi pada masa DI/TII di Jeneponto/Takalar (Jentak) tahun 1950-1960.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar (Jentak) tahun 1950-1960. Batasan temporal yang dikaji pada jurnal ini yakni 1950-1960. Dimana 1950 tahun awal Qahar Muzakkar bergerilya ke hutan dan melakukan ekspansi ke daerah Sulawesi dan sekitarnya hingga berhasil masuk Jeneponto/Takalar pada tahun 1952 lalu pada 1960 akhir masa DI/TII di Jeneponto/Takalar. Batasan spasial jurnal ini di *Kewedanan* Jeneponto/Takalar. Batasan tematik kajian tulisan ini yakni Sejarah Sosial.

B. Metode Penelitian

Pada dasarnya metodologi adalah prosedur eksplanasi (penjelasan) yang

digunakan suatu cabang ilmu, termasuk ilmu sejarah, oleh karena itu metodologi atau *Science Of Methods* merupakan ilmu yang membicarakan jalan penelitian. (Kuntowijoyo, 1994) Penelitian sejarah adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ikhwal kejadian-kejadian yang telah berlangsung pada masa lampau. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder dengan tahapan kerja :

a. Heuristik

Heuristik artinya mengumpulkan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebagai sumber penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian arsip di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara dengan orang-orang yang pernah hidup pada masa DI/TII yakni : Akba Daeng Nya'la (101 tahun), Suru' Daeng Rate (96 tahun), H. Siratu Daeng Tumpu (79 tahun), Dorman Daeng Ngalle (89 tahun), Nillam Daeng Caya (95 tahun), dan Abd. Malikul Hakkul Mubin Makka (70 tahun), penelusuran pustaka yakni di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Multimedia Makassar.

b. Kritik

Kritik sumber dilakukan untuk menentukan keaslian data dan kebenaran sumber sejarah. Sumber yang telah didapatkan dari pengumpulan data kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu karena tidak semua data yang diperoleh dapat digunakan pada karya tulis ini.

c. Intrepertasi

Tahap ketiga dalam metode sejarah ialah intrepertasi, pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan. Tahap ketiga dalam metode sejarah ialah

intrepertasi, pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan.

d. Historiografi

Berbagai pernyataan mengenai masa lampau yang telah disentesakan selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah atau historiografi.

C. Tinjauan Penelitian

Keresidenan Celebes (Sulawesi) daerah tergantung 1941 membagi dalam 7 *afdeling* (Kabupaten), yaitu: *afdeling* Makassar, *afdeling* Bonthain, *afdeling* Bone, *afdeling* Pare-pare, *afdeling* Mandar, *afdeling* Luwu', *afdeling* Buton. *Afdeling* (kabupaten) menaungi beberapa kewedanan. *Afdeling* Makassar sendiri menaungi beberapa *onder afdeling* (Kewedanan), diantaranya yaitu: Kewedanan Makassar, Kewedanan Maros, Kewedanan Pangkajene, Kewedanan Goa, Kewedanan Jeneponto/Takalar. Kemudian Kewedanan Jeneponto/Takalar terdiri dari distrik: Takalara, Topejawa, Polongbangkeng, Sanrabone, Galesong, Pappa, Lengkesse, Lakatong, Laikang, dan Bangkala, pulau-pulau Tanakeke, Auluang, Satanga dan Dayang-Dayangan, Binamu (termasuk masyarakat adat Tarawang, Rumbia, dan Tino-Pacinongan), dan Arungkeke. (Harvey, 1989)

Tanggal 1 Mei 1959, berdasarkan undang-undang no. 29 tahun 1959 menetapkan terbentuknya daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Kewedanan Jeneponto/Takalar terletak di ujung Selatan bagian Barat dari wilayah Propinsi Sulawesi secara geografis. Ditinjau dari batasannya, Kewedanan Jeneponto/Takalar (Jentak) berbatasan dengan:

- 1) Di sebelah barat berbatasan dengan Kewedanan Gowa
- 2) Di sebelah timur berbatasan dengan Kewedanan Bonthain
- 3) Di sebelah utara berbatasan dengan Kewedanan Gowa

- 4) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

Kondisi tanah Kewedanan Jeneponto/Takalar umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, dapat dilihat bahwa pada bagian Utara terdiri dari daratan tinggi dan bukit-bukit dari Barat ke Timur. Daerah ini cocok bila dijadikan areal pengembangan tanaman, dan mencari kayu bakar. Dibagian tengah Kewedanan Jeneponto-Takalar meliputi wilayah daratan. Di bagian Selatan terhampar pesisir pantai, yang cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan usaha perikanan.

Masyarakat Jeneponto/Takalar (Jentak) masih menjunjung tinggi strata sosial atau Kasta. Strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jentak yakni *Karaeng* (bangsawan), *Daeng* (orang merdeka), *Ata* (budak). (Caya, 2018) Ketiga strata sosial tersebutlah yang menjadi pembeda begitu nyata di masyarakat Jeneponto/Takalar (Jentak). Selain itu Masyarakat Jeneponto/Takalar masih sangat menjunjung tinggi *Siri'* (malu) *na Pacce* (pedih) yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial masyarakat Jeneponto-Takalar. *Siri'* menurut arti harafiahnya adalah malu. (Nya'la, 2018) *Pacce* nampak dari adanya ungkapan harafiah dari istilah itu ialah pedih. Dengan demikian pengertian yang terkandung di dalamnya juga berkaitan dengan "perasaan" manusia. Oleh karena itu *pacce* dianggap sebagai alat perekat untuk menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat. (Tumpu, 2018)

Mayoritas masyarakat Jeneponto/Takalar (Jentak) menganut agama Islam, tetapi masyarakat belum bisa meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya sepenuhnya. Hal ini terlihat dengan masih banyak masyarakat Jeneponto/Takalar (Jentak) yang masih melakukan ritual-ritual yang menghormati nenek moyang. Seperti membawa sesajian

ke sungai atau ke laut. Hal ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan karena masyarakat telah lama melakukan ritual pemujaan terhadap kepercayaan nenek moyang. (Makka, 2017)

Dalam sistem pemerintahan Jeneponto/Takalar stratifikasi sosial memberikan pengaruh besar, karena individu akan melakukan peran kepemimpinan. *Karaeng* mendapatkan peluang yang lebih besar dalam memimpin rakyat. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang strata sosialnya lebih tinggi. Terpilihnya *Karaeng* sebagai pemimpin karena memiliki wibawa pribadi yang bijak dan memiliki pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki orang lain. (Tumpu, 2018)

D. PEMBAHASAN

1. Kondisi Masyarakat Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar (Jentak) Tahun 1950-1960

Sejak tahun 1950 Qahar Muzakkar telah bergerilya ke hutan dan melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang ada di Sulawesi dan sekitarnya. Pada tahun 1952 pasukan Qahar Muzakkar berhasil memasuki Kewedanan Jeneponto/Takalar. Hal ini dapat dilihat dari hasil kutipan surat dengan No. 693/02/3 yang berbunyi:

Pada ini hari Jumat tanggal 19/12/1952 maka saya Menggelai Djuru Tulis kepala distrik Binamu menerima laporan dari Lentu (KepalaKampung Lettu), Binamu Jeneponto menerangkan. Tadi siang hari Jumat tanggal 19/12/195 jam 12.30 maka dikepung Mesjid Lentu oleh Gerombolan. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99)

Hanya saja gerakan gerilya Qahar Muzakkar baru di proklamirkan secara resmi bergabung dengan DI/TII pada tahun 1953. Tepatnya pada tanggal 27 Dzulaid 1372 / 7 Agustus 1953 Abdul Qahar Muzakkar membacakan Proklamasi bergabungnya daerah Sulawesi dan sekitarnya dengan Negara Republik Islam Indonesia yang

didirikan oleh Kartosuwirjo pada tanggal 12 Sjawal 1368 / 7 Agustus 1949. (Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg 324)

a. Kondisi Sosial

Rakyat Jeneponto/Takalar pada masa DI/TII tertekan karena kondisi daerah yang tidak aman. Pada masa DI/TII setiap hari masyarakat sangat ketakutan baik itu siang maupun malam karena TNI dan DI/TII bergantian memasuki kampung. Pada malam hari DI/TII mendatangi rakyat meminta yang laki-laki untuk bergabung dengan DI/TII selain itu meminta barang-barang milik rakyat yang bisa dimakan seperti beras dan kuda. Apabila rakyat menolak maka akan ditembak mati oleh DI/TII. Sehingga rakyat tidak bisa menolak karena nyawa menjadi taruhannya. Kemudian, pada siang hari TNI datang mengintrogasi rakyat mempertanyakan orang-orang yang bergabung dengan DI/TII. Rakyat hanya diam karena takut jika menjawab maka siap-siap malam harinya akan diculik oleh DI/TII. Selain itu apakah jawabannya benar atau salah tetap saja rakyat digertak oleh tentara bahkan terkadang ditembak jika ketahuan bahwa salah satu anggota keluarganya bergabung dengan gerombolan. Akhirnya rakyat lebih memilih bungkam. (Caya, 2018)

Salah satu bukti penikaman yang terjadi pada masa DI/TII yakni berdasarkan salah satu surat dari Kepala Distrik Binamu, Djuru Tata Usaha Tkt. II yang ditanda tangani oleh Sultan Daeng Miri dikirim kepada Kepala Distrik Bangkala di Allu, Kepala Distrik Arungkeke di Tamanroja, Kepala Distrik Tarawang di Tarawang, dan tembusan kepada Kepala Daerah Djeneponto/Takalar di Djeneponto. Laporan pembunuhan yang terjadi di Djeneponto tanggal 20 Mei 1957 laporan lelaki nama Badarakin di kampung Barugaja mati ditikam dari lelaki Tepu kampung Barugaja.

(Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99)

Kondisi rakyat yang ketakutan dan tertekan berakibat pula pada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rakyat kesulitan untuk mencari sumber makanan akibatnya rakyat sering kali harus merasakan kelaparan. Salah satu makanan yang dapat dimakan oleh rakyat yaitu hanya memakan batang pisang yang telah dihancurkan kemudian dimasak dengan campuran beras jagung satu genggam. Rakyat tidak bisa bertani dan mencari bahan makanan di tempat yang jauh karena kondisi yang tidak aman.

Rakyat yang tinggal di pesisir pantai contohnya di Lingkungan Pannara terpaksa harus *barter* dengan masyarakat yang ada di pegunungan yakni Desa Kelara, yaitu menukar pakaian atau kain dengan *Lame* (Ubi Jalar) untuk dimakan. Proses *barter* nya pun tidak mudah karena harus menempuh jalan yang jauh dan bertarung nyawa. Jika hal ini diketahui oleh TNI bahwa rakyat dari *Romang* atau keluar kampung akan dicurigai sebagai anggota DI/TII. (Caya, 2018)

Kondisi perempuan begitu memprihatinkan karena harus diambil paksa oleh anggota DI/TII untuk dinikahi. (Nya'la, 2018) Satu hal yang telah menjadi keputusan konferensi Wanua Waru 1955 yang termaktub dalam program Islam Revolusioner dalam pasal 8 yang menganjurkan berlakunya poligami di kalangan anggota gerombolan Pergerakan DI/TII terutama kepada komandan-komandan dianjurkan untuk memelihara atau menikahi janda-janda syuhada yang suaminya telah gugur di medan pertempuran. (Mattalioe, 1994)

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi keamanan yang tidak stabil di Jeneponto/Takalar selama masa DI/TII membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat yang semestinya bekerja di sawah, ladang, atau

beternak sebagai sumber penghasilan untuk bertahan hidup justru sibuk untuk mengamankan diri dari DI/TII maupun TNI. Sumber utama penghasilan rakyat Jeneponto/Takalar kala itu adalah bertani dan beternak namun terdapat pula yang tidak memiliki kerjaan karena tidak ada yang bisa di kerjakan sebagai sumber penghasilan. Sehingga banyak rakyat yang tak mampu untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Selain itu rakyat yang tinggal di pesisir pantai juga terbatas jika hendak melaut karena masih kurangnya rakyat yang memiliki perahu kalau pun ada yang memiliki perahu hanya 1-3 orang dalam 1 kampung.

Rakyat sering kali harus berpikir berbagai cara agar bisa bertahan hidup di tengah kekacauan yang terjadi. Sebagai salah satu cara, contohnya rakyat yang tinggal di daerah pesisir jika memiliki baju bekas maka akan di tukar di daerah pedalaman untuk mendapatkan bahan makanan seperti ubi, dengan pertarungan nyawa karena kondisi yang tidak aman. Sedangkan untuk anggota DI/TII telah di atur pula cara hidupnya dalam piagam makalua Bab x tentang cara hidup dan hak milik Mujahidin dan keluarganya dalam proses revolusi. Pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 51 segenap pejuang islam revolusioner (tidak di bedakan antara atasan dan bawahan) selama dalam proses revolusi tidak di bolehkan memiliki barang dan harta berharga. (Mattalioe, 1994)

“Sulit rasanya rakyat tidak memberikan barang-barangnya kepada DI/TII karena yang menjadi anggota gerombolan (DI/TII) termasuk salah satu dari pihak keluarga, sehingga mau atau tidak barang-barang kami tetap di ambil dengan segala janji kehidupan lebih baik. Contohnya, bapak saya punya seekor kuda kemudian diambil paksa oleh paman saya sendiri yang telah bergabung dengan DI/TII. Tetapi kami tidak bisa menahannya karena

kami pun kasihan jika paman mendapatkan sanksi dari DI/TII. Sehingga kami terpaksa mengikhlaskan kuda tersebut. (Caya, 2018)

Pada masa DI/TII beredar pula uang yang telah di cap oleh DI/TII. Berdasarkan arsip propinsi Sulawesi tahun 1955-1956 dalam surat 27 Agustus 1955 No. surat Pemx III/60/15, peihal uang kertas diberi cap oleh gerombolan. Rakyat diminta untuk diberi cap DI/TII pada uang yang dimilikinya. Mendengar hal tersebut pemerintah kembali mengeluarkan surat pada tanggal 13 Mei 1955 mengeluarkan pengumuman bahwa rakyat dilarang menggunakan uang yang telah dicap oleh DI/TII. Dikeluarkannya pengumuman tersebut membuat rakyat semakin kebingungan, harus menaati aturan pemerintah atau aturan DI/TII. Karena keduanya sama-sama memberikan ancaman jika melanggar.

c. Kondisi Pemerintahan

Di tengah kekacauan daerah pemerintah masih tetap memperhatikan kestabilan kondisi pemerintahan. Sebagai contoh di Kewedanan Jeneponto/Takalar, pemerintah masih berkesempatan melakukan pemilihan Kepala (Gabungan) Kampung pada hari kamis, tanggal 3 Maret 1955 didaerah Distrik Bangkala yakni gabungan kampung Karampuang, kampung Bulu-bulu. Sistem pemilihannya pun dengan cara pencalonan kepala kampung. Sebagai contoh di kampung Karampuang terdapat dua orang yang mencalonkan diri sebagai kepala kampung yakni saudara Nassa dan saudara T. Djamalong. Dengan perolehan suara untuk saudara Nassa total suaranya 19 sedangkan saudara T. Djamalong total suaranya 56. Maka dengan sanagat jelas bahwa T. Djamalong telah terpilih sebagai kepala kampung Karampuang. (Inventaris Arsip Jeneponto. No. Reg. 60)

Kemudian pada tanggal 8 Djanuari 1957 telah masuk surat ke kepala distrik Tarowang. Surat tersebut merupakan surat

permohonan dari Kepala Kewedanan Djeneponto (H. Mattewakkang Deng Radja) agar segera melakukan pemilihan kepala Distrik Bawahan/Djannang-Allu-Tarowang. Kemudian pada tanggal 28 Septemner 1956 kepala Distrik Tarowang atas nama H. R. Dg. Lurang mengirim surat kepada Kepala Pemerintahan Negeri di Djeneponto. Dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

Amat sulit sekali melantjukan pemerintah kami di sini, apabila kepala distrik bawahan/Djannang Allu belum ada, karena sekian lamanja belum ada kepala Distrik bawahan/Djannang Allu hanya wakil sadja. Dari sebab itu maka kami Kepala Distrik Tarowang kepada anda agar kiranja bisa disetudjui untuk mengadakan pemilihan Kepala Distrik bawahan/ Djannang Allu tsb. Selandjutnja bila Kepala Distrik bawahan/Djannang Allu tsb. Belum ada ketetapan hanja wakil sadja, maka daerah Allu tsb. Masih dalam keragu-raguan, dan pendapat kami kalau wakil sadja tidak bertanggung jawab penuh atas mendjalankan tugas2 pemerintahan, bila belum ada ketetapan sebagai kepala Distrik bawahan/Djannang Allu.

Demikianlah permohonan kami ini, agar kiranya dapat disetudjui dan kabar dengan selekas mungkin (Inventaris Arsip Jeneponto. No. Reg. 60)

Dalam surat tersebut dengan jelas bahwa suatu daerah sangat membutuhkan seorang pemimpin. Meskipun ada wakil tetapi seorang wakil tidak mampu bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas pemerintahan. Apalagi di tengah kekacauan daerah sangat sulit pemerintah mengontrol rakyat jika tidak memiliki seorang pemimpin.

2. Dinamika Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar (Jentak) Tahun 1950-1960

a. Latar Belakang Aksi Perampokan

Aksi perampokan telah ada sejak masa pemerintahan Belanda, sesuai yang disampaikan oleh Suru' Daeng Rate bahwa "Sebelum masuknya *gerombolonna* di Jeneponto/Takalar memang telah banyak

perampok. Itu *mi* perampok yang sering menghadang kendaraan yang lewat di jalan raya dan mengambil paksa barang-barang dan biasa membunuh”. (Rate, 2018) Dalam penyampaian tersebut dikatakan bahwasanya aksi perampokan telah banyak terjadi sebelum masa DI/TII. Perampok menghadang kendaraan di jalan raya dan mengambil paksa barang-barang serta membunuh pemilik barang-barang tersebut. Sehingga hal ini menjadi bukti bahwa perampokan muncul bukan hanya pada masa DI/TII melainkan sejak masa perjuangan kemerdekaan.

Sejalan dengan penyampaian tersebut, dalam buku M. Nafsir Palallo dengan judul *Bandit Sosial Di Makassar (Jejak Perlawanan I Tolok Dg. Magassing)* menjelaskan bahwa sebelum masa kemerdekaan ada seorang tokoh legenda terkenal yakni I Tolok Daeng Magassing yang bermarkas di wilayah Polongbangkeng sekarang Kabupaten Takalar. Gerakan perampokan Ranggong Daeng Romo’ kemudiandilanjutkan oleh adik kandungnya yakni Makatang Daeng Sibali di Takalar (Komandan Batalyon 721 gerombolan/Tetrun 7) Makatang Daeng Sibali melancarkan aksinya sejak tahun 1947-1950. (Harvey, 1989)

Berdasarkan suatu pengumuman Markas Besar TT. IV T. I. I. KOM. PAS. HASANUDDIN dengan No. 004/BP/TT.IV/TII/. Pada tanggal 6 Djumadil Akhir 1353 / 10 Pebruari 1954 Abdul Qahar Muzakkar mengeluarkan pengumuman yang isinya bahwa saudara Abd. Baddade dan kesatuan B. H. I. (Barisan Harimau Indonesia) dipecat secara tidak hormat dan dikeluarkan dari Formatic Terrotorium IV Tentara Islam Indonesia. Hal ini berdasarkan bahwa B. H. I. adalah barisan perampok. (Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg 324) Meski demikian pada masa DI/TII masih saja berlangsung aksi perampokan karena

tuntutan kebutuhan hidup rakyat, namun terbatas dalam sumber penghasilan karena kondisi daerah yang tidak aman.

Dalam revolusi Indonesia, banyak dijumpai para bandit yang memanfaatkan jalannya revolusi. Apabila pada suatu saat timbul kegentingan dan alat-alat pemerintah menjadi lemah serta tidak berdaya menguasai situasi, maka unsur-unsur kriminal “berperan” untuk kepentingan pribadinya. Mereka membonceng gerakan revolusioner atau badan-badan perjuangan yang menjadikan teror dan kekerasan sebagai alat untuk menjalankan kekuasaannya. (Ibrahim, 2004)

b. Jalannya Aksi Perampokan

Aksi perampokan sering kali terjadi di jalan-jalan raya yakni melakukan penghadangan, di pasar, hingga masuk ke kampung-kampung. Perampokan dilakukan menggunakan senjata tajam seperti Pistol dan parang. (Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960 No. Reg 65) Waktu perampokan dilakukan setiap hari, sesuai dengan kesempatan yang ada. Aksi perampokan dilakukan lebih dari 1 orang, bahkan sering kali pelaku perampokan mencapai 50 orang dalam satu kali melancarkan aksi perampokan. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99)

Berdasarkan surat yang dikirim oleh a.n. (atas nama) Kepala Distrik Bangkala yaitu Hadji Abu Dg. Tumpu ditujukan kepada Kepala Distrik Binamu di Djeneponto, Kepala Distrik Arungkeke di Tamanroja, Kepala Distrik Tarowang di Tarowang, dan tembusan kepada Kepala Daerah Djeneponto/Takalar di Djeneponto. Salinan Kantor Distrik Bangkala, Djeneponto, 3 juni 1957 perihal laporan pencurian sepeda. Dalam laporan dijelaskan bahwa pada hari senin tanggal 3 Juni 1957 sekitar jam 09.00 kami mendapatkan laporan dari *Gelarang Pallengu*, menyatakan bahwa pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 1957 jam 09.00 lelaki asal dari kampung Lambupeo-

Pallengu kecurian sepedanya yang sedang disandarkan di samping rumah tukang sepeda di Allu yang bernama M. Asang. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 102)

Pada tanggal 29 Oktober 1959 masuk sebuah laporan dari Wakil Kepala Distrik Binamu, Djuru Tata Usaha I, bertanda tangan L. Dg. Njengka. Yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Negeri Djeneponto di Djeneponto. Isi surat tersebut mengenai laporan perampokan yang dilakukan oleh anggota Pergerakan DI/TII di Mangadu-Takalar. Berdasarkan isi surat tersebut dijelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 29 Oktober 1959 jam 10 pagi datang kepada saya Lambusi Dg. Njengka Djuru Tata Usaha I dikantor kepa Distrik Binamu, yaitu seorang perempuan bernama: Karengai, umur kira-kira 25 tahun lahir dan bertempat tinggal di Kampung Bonto-bonto Djeneponto dengan menumpang *oto* (mobil)nya H. Bakkang Pallengu-Bangkala, setibanya di Mangadu-Takalar kira-kira jam 7 malam lantas *oto* yang ditumpangi Karengai itu dapat tembakan beberapa kali, *oto* tersebut lantas stop/berhenti, diantaranya beberapa orang penumpang *oto* itu, yakni seorang anak-anak yang meninggal terkena tembakan itu, dan seorang perempuan, ibunya anak yang meninggal mendapat luka parah kena tembakan, juga seorang tentara yang tidak diketahui kesatuannya mendapat pula luka *enteng* (ringan) pada lengan tangannya.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Karengai bahwa pada tempat penghadangan itu adalah anggota gerombolan DI/TII yang menghadang *oto* (mobil) nya H. Bakkang. Pada malam itu juga kebetulan ada *oto* (mobil) lagi mau turun ke Makassar, lalu mayat dan orang-orang yang luka it uterus diangkut ke Makassar. Selanjutnya Karengai pula dirampas barang-barangnya yang ada di atas *oto* (mobil) yang ditumpangnya itu oleh

gerombolan DI/TII, macam barang-barang yang dirampol ialah:

1. 20 liter beras gilling yang dibeli di Makassar dengan harga Rp. 70,-
2. 1 belik beras minyak tanah 19 liter dengan harga Rp. 42,-
3. 2 lembar baju kemeja baru standar dengan harga Rp. 500,-
4. 1 lembar celana Jongkor pendek baru dengan harga Rp. 50,-
5. 2 lembar sarung palekat baru dengan harga Rp. 260,-

Sehingga total harga keseluruhan Rp. 922,- barang milik Karengai yang berhasil dirampok. Begitupun penumpang pada *oto* itu dirampas barang-barangnya malam itu. Karengai terus naik menumpang *bendi* (dokar) saja sampai ke Allu. Demikialah keterangan Karengai tersebut dibuat laporan ini dengan sebenar-benarnya untuk dimaklumi seperlunya. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No Reg 101)

c. Akhir Aksi Perampokan

Salah satu yang ditempuh untuk menumpas aksi perampokan yang terjadi di Jeneponto/Takalar adalah dengan melakukan kerjasama dengan rakyat yang masih bersedia membantu pemerintah. Rakyat dijadikan sebagai mata-mata dalam kampung untuk mengintai dengan siapa para pelaku perampokan bekerjasama dan siapa saja yang telah tergabung dengan gerombolan. hal ini mempermudah untuk mengawasi aksi perampokan. (Dorman, 2018) TNI dalam mengamankan aksi perampokan dibantu oleh anggota Organisasi Pengamanan Daerah (O. P. D.) yang melakukan patrol keliling daerah. Organisasi Pengamanan Rakyat (O. P. R.) juga turut membantu mengamankan daerah dengan melakukan patroli keliling kampung, pasar dan jalan raya. (Tumpu, 2018) Selain itu TNI memperketat penjagaannya di pos

keamanan, sehingga rakyat bisa segera melaporkan jika terjadi aksi perampokan.

Adapun cara menindaklanjuti aksi perampokan adalah dengan melaporkan kepada Kepala Distrik lokasi perampokan. Kemudian diteruskan ke Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia. Hal ini dapat dili hat dalam surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djeneponto. Yang di ttd oleh kepala kejaksaan pengadilan negeri Djeneponto (Hadji Sangko).

Berdasarkan upaya penumpasan tersebut sehingga beberapa perampok yang berhasil tertangkap. Adapun beberapa anggota DI/TII yang berhasil tertangkap yaitu : Karaeng Empoang, Manggau Daeng Sanggu, Bongga Daeng Ni'rak, Sakulang Umur 38 tahun (Kampung Bungeng), Sampu umur 28 tahun (Kampung Bungeng), Tjetci umur 28 tahun (Kampung Bungeng), Genra umur 41 tahun (Kampung Bungeng), Malagau umur 39 tahun (Kampung Bungeng).

Pada tanggal 9 Juni 1958 pemimpin DI/TII daerah Jeneponto-Takalar yakni Rasjid Kr. Siga d.k.k telah menyerahkan diri pada Angkatan Perang Bn. Inf. 714. Kie. "S". berdasarkan surat dari a.n. Kepala Daerah Djeneponto-Takalar Kepala Bahagian Politik yaitu Achmad Munassar ditujukan ke Gubernur Militer Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar dan Gubernur Sulawesi Bahagian Politik di Makassar. Pada tanggal 27 April 1959 Wakil Kepala Djawatan Penerangan R. I. Propinsi Sulawesi mengirim surat kepada Djawatan Penerangan R. I. Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sulawesi. Dengan no. surat 13/P. U/Rhs/59 perihal folder keamanan dengan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa "hanya dengan bersatu, keamanan dapat dipulihkan". Hingga keluarnya surat Pemerintah Daerah Tingkat II Djeneponto pada tahun 8 Desember 1959 dengan No. Pem./3/5/24 perihal keamanan sudah pulih kembali.

3. Dampak Aksi Perampokan Pada Masa DI/TII Di Jeneponto/Takalar (Jentak) Tahun 1950-1960

a. Dampak Sosial

Rakyat terbunuh secara sadis, karena pelaku perampokan tidak segan-segan mengerluarkan tembakan atau memakai senjata tajam lainnya jika rakyat yang hendak dirampok melakukan perlawanan. Salah seorang korban perampokan atas nama Badarakin Daeng Sija, pada tanggal 12 Mei 1957 di rampok oleh gerombolan orang yang tidak dikenalnya. Badarakin mendapat luka pada bagian perutnya yang ditikam oleh gerombolan perampok tersebut. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99) Sehingga hal ini menjadi gambaran bahwa rakyat mengalami kekerasan fisik yang bisa berujung pada kematian.

Kekerasan, ketakutan, kekurangan sumber makanan, komplit sudah penderitaan rakyat. Meski semangat bekerjanya besar tetapi karena kondisi daerah yang tidak aman membuat rakyat sulit untuk mencari sumber penghasilan. Akhirnya rakyat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semenjak aksi perampokan sering terjadi. Saling berebut makanan pun dirasakan oleh rakyat, karena tidak adanya sumber bahan makanan. Sulitnya mencari sumber bahan makanan mengakibatkan rakyat harus berebut makanan untuk bertahan hidup. (Tumpu, 2018)

b. Dampak Ekonomi

Kondisi perekonomian akibat aksi perampokan sangatlah membuat rakyat terpuruk. Rakyat sangat menderita karena makan sangat susah. Adanya perampokan tersebut membuat banyak rakyat kehilangan harta bendanya, serta rakyat kekurangan waktu untuk bekerja karena rakyat secara sukarela bergabung dengan O.P.R. (Organisasi Pengamanan Rakyat) tujuannya agar bisa segera menumpas pelaku

perampokan dan daerah Jeneponto/Takalar kembali aman. (Caya, 2018)

Selain itu sumber-sumber perekonomian yang ada di daerah-daerah pedalaman dikuasai secara *de facto*, oleh “pemerintah” DI/TII di Jeneponto/Takalar. (Gonggong, 1992) Penguasaan sumber-sumber ekonomi pedalaman oleh DI/TII tentu saja menyulitkan kehidupan rakyat pada umumnya. Tidak saja mereka yang harus terpaksa menyingkir daerah-daerah lain untuk menghindari kekacauan, juga kesulitan hidup itu dialami oleh mereka yang mencoba bertahan. Namun ada pula rakyat yang tergantung pada tanah persawahan mereka yang letaknya di daerah yang dikuasai oleh DI/TII. Kondisi tersebut semakin memperparah kondisi perekonomian rakyat.

c. Dampak Pemerintahan

Pemerintah di tengah kekacauan bekerja dengan sangat hati-hati. Jika pun ada yang menjalankan pemerintahan di beberapa daerah, mereka bekerja “ala kadarnya”. (Rate, 2018) Kantor-kantor pemerintahan tidak difungsikan sebagaimana mestinya kantor yang harus datang pada hari jam kerjanya. Tetapi karena kondisi daerah yang tidak aman sehingga banyak pegawai pemerintahan yang tidak ke kantor pemerintahan. Setelah keamanan di Jeneponto/Takalar telah pulih kembali, barulah pemerintah Jeneponto-Takalar kembali melaksanakan tugas pemerintah secara aman, tujuannya agar rakyat bisa kembali diatur secara tertib dan aman. (Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99)

Keadaan demikian melumpuhkan jalannya pemerintah di Kewedanan Jeneponto/Takalar. Disiplin bernegara dalam arti melaksanakan pengaturan kehidupan negara yang seharusnya berdasarkan atas aturan-aturan administrasi yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga negara, tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Penataan

pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

E. KESIMPULAN

Selama masa DI/TII di Jeneponto/Takalar tahun 1950-1960 rakyat tidak pernah merasa aman karena kekacauan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri kekacauan daerah banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi perampokan. Terlebih lagi pada masa DI/TII kondisi perekonomian memang sangat tidak terkontrol. Tidak adanya sumber penghasilan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga terjadilah aksi perampokan yang merisaukan rakyat Jeneponto/Takalar. Sulitnya mengidentifikasi pelaku aksi perampokan karena kondisi daerah yang kacau. Terlebih lagi aparat keamanan dan pemerintahan fokus menumpas gerakan DI/TII yang sedang bergejolak di Jeneponto-Takalar. Namun setelah keluarnya surat pemerintah Jeneponto/Takalar menjadi akhir aksi perampokan pada tahun 1959 yang menyampaikan bahwa kondisi daerah telah pulih kembali dan meminta agar aparat keamanan dan pemerintahan kembali bekerja tanpa perlu rasa was-was lagi karena kondisi daerah Jeneponto/Takalar telah pulih kembali dan aman.

Aksi perampokan yang terjadi pada masa DI/TII tentunya membawa dampak bagi rakyat dan daerah itu sendiri. Adapun dampak sosial yang dirasakan oleh rakyat yaitu Kekerasan, ketakutan, kekurangan sumber makanan, lengkap sudah penderitaan rakyat. Aksi perampokan juga turut berpengaruh pada kondisi pemerintahan, karena barang-barang milik pemerintah pun turut dirampok, pegawai pemerintahan merasa pun tidak memfungsikan kantornya. Akibatnya kondisi pemerintahan menjadi tidak terkontrol.

REFERENSI

- Caya, N. D. (2018). *Keluarga Anggota DI/TII*. Wawancara.
- Dorman. (2018). *Anrong Guru (Tokoh Agama)*. Wawancara.
- Gonggong, A. (1992). *Abdul Qahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hamid, A. R. (2008). *Qahar Muzakkar Di Persimpangan Jalan*. Makassar: Pustaka Refleksi.s
- Harvey, B. S. (1989). *Pemberontakan Qahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Ibrahim, J. (2004). *Bandit Dan Pejuang Di Simpang Bengawan (Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surabaya)*. Wonogiri, Jawa Tengah: Bina Citra Pustaka.
- Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No Reg 101.*
- Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 102.*
- Inventaris Arsip Jeneponto 1910-1969 No. Reg. 99.*
- Inventaris Arsip Jeneponto. No. Reg. 60.*
- Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960 No. Reg 65.*
- Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg 324.*
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Makka, A. M. (2017). (Catatan Pribadi) *Faktor Penyebaran Islam Di Jeneponto*. Jeneponto: Tanpa Penerbit.
- Mattalioe, B. (1994). *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nya'la, A. D. (2018). *anggota O.P.R (Organisasi Pengamanan Rakyat) Masa DI/TII*. Wawancara.
- Piliang, I. J. (2010). *Bouraq-Singa Kontra Garuda (Pengaruh Sistem Lambang Dalam Separatisme GAM Terhadap RI*. Yogyakarta: Ombak.
- Rate, S. D. (2018). *Gallarrang (Kepala Kampung) Masa DI/TII*. Wawancara.
- Tumpu, H. S. (2018). *Anggota O.P.R. (Organisasi Pengamanan Rakyat) Masa DI/TII*. Wawancara
- Wanua Tangke, d. (2005). *Jejak-Jejak Radikal Kahar Muzakkar*. Makassar: Pustaka Refleksi.